

## BAB III

# PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

### 3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN DISPARPORA

#### 3.1.1 Identifikasi Permasalahan Kepemudaan

Masalah Pemuda adalah masalah abadi yang akan terus ada karena masalah pemuda merupakan akibat proses pendewasaan dan perubahan seseorang untuk lebih memahami dan mengenal akan karakter individu masing-masing. Dengan hal tersebut tentu akan mempengaruhi cara atau proses seseorang dalam bersosialisasi dengan berbagi pihak dalam jangka waktu pendek maupun dalam waktu panjang. Dan dalam hal sosialisasi bermasyarakat, pemuda ikut mempengaruhi proses interaksi karena peran pemuda sebagai tumpuan penerus bangsa yang tidak selaras dapat mengakibatkan ketidaksinambungan yang cukup signifikan bagi lingkungan dan kehidupan bermasyarakat.

Pemuda adalah generasi penerus dari generasi terdahulu. Anggapan itu merupakan beban moral yang ditanggung bagi pemuda untuk memenuhi tanggung jawab yang diberikan generasi tua. Selain memikul beban tersebut pemuda juga dihadapkan persoalan-persoalan diantaranya kenakalan remaja, ketidak patuhan pada orang tua/guru, kecanduan narkoba, frustasi, masa depan suram, keterbatasan lapangan kerja dan masalah lainnya. Seringkali pemuda dibenturkan dengan "nilai" yang telah ada jika mereka berkelakuan di luar nilai tersebut. Konsep kepemudaan selalu dikaitkan dengan masalah nilai. hal ini merupakan pengertian idiologis dan kultural daripada pengertian ini. Di dalam masyarakat pemuda merupakan satu identitas yang potensial sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber insani bagi pembangunan bangsanya karma pemuda sebagai harapan bangsa dapat diartikan bahwa siapa yang menguasai pemuda akan menguasai masa depan.

Ada beberapa kedudukan pemuda dalam pertanggungjawabannya atas tatanan masyarakat, antara lain:

- a) Kemurnian idealismenya
- b) Keberanian dan Keterbukaanya dalam menyerap nilai-nilai dan gagasan-gagasan yang baru
- c) Semangat pengabdianya
- d) Spontanitas dan dinamikanya
- e) Inovasi dan kreativitasnya
- f) Keinginan untuk segera mewujudkan gagasan-gagasan baru
- g) Keteguhan janjinya dan keinginan untuk menampilkan sikap dan keperibadiannya yang mandiri
- h) Masih langkanya pengalaman-pengalaman yang dapat merelevansikan pendapat, sikap dan tindakanya dengan kenyataan yang ada.

Beberapa hal penting dalam memahami permasalahan pembentukan tata nilai pemuda;

## A. Sosialisasi Pemuda

### A.1 Pengertian Sosialisasi

Proses kehidupan yang dialami oleh para pemuda Indonesia tiap hari baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat membawa pengaruh yang besar pula dalam membina sikap untuk dapat hidup di masyarakat. Proses demikian itu bisa disebut dengan istilah sosialisasi, proses sosialisasi itu berlangsung sejak anak ada di dunia dan terus akan berproses hingga mencapai titik kulminasi.

Sosialisasi diartikan sebagai sebuah proses seumur hidup bagaimana seorang individu mempelajari kebiasaan-kebiasaan yang meliputi cara-cara hidup, nilai-nilai, dan norma-norma social yang terdapat dalam masyarakat agar dapat diterima oleh masyarakatnya.

### A.2 Proses Sosialisasi

Menurut George Herbert Mead, sosialisasi yang dialami seseorang dapat dibedakan dalam tahap-tahap sebagai berikut.:

### 1. Tahap persiapan (Preparatory Stage)

Tahap ini dialami manusia sejak dilahirkan, ketika seorang anak mempersiapkan diri untuk mengenal dunia sosialnya, termasuk untuk memperoleh pemahaman tentang diri. Pada tahap ini juga anak-anak mulai melakukan kegiatan meniru meski tidak sempurna. Contoh: Kata "makan" yang diajarkan ibu kepada anaknya yang masih balita. Makna kata tersebut juga belum dipahami dengan tepat oleh anak. Lama-kelamaan anak memahami secara tepat makna kata "makan" tersebut dengan cara menghubungkannya dengan kenyataan yang dialaminya.

### 2. Tahap meniru (Play Stage)

Tahap ini ditandai dengan,

Semakin sempurnanya seorang anak menirukan peran-peran yang dilakukan oleh orang dewasa. Mulai terbentuk kesadaran tentang nama diri dan siapa nama orang tua, kakak, dan sebagainya. Anak mulai menyadari tentang apa yang dilakukan seorang ibu dan apa yang diharapkan seorang ibu dari anak. Dengan kata lain, kemampuan untuk menempatkan diri pada posisi orang lain juga mulai terbentuk pada tahap ini. Kesadaran bahwa dunia sosial manusia berisikan banyak orang. Sebagian dari orang tersebut merupakan orang-orang yang dianggap penting bagi pembentukan dan pertahanan diri, yakni dari mana anak menyerap norma dan nilai (Significant other).

### 3. Tahap siap bertindak (Game Stage)

Peniruan yang dilakukan sudah mulai berkurang dan digantikan oleh peran yang secara langsung dimainkan sendiri dengan penuh kesadaran. Kemampuannya menempatkan diri pada posisi orang lain pun meningkat sehingga memungkinkan adanya kemampuan bermain secara bersama-sama. Dia mulai menyadari adanya tuntutan untuk bekerja sama dengan teman-temannya. Pada tahap ini lawan berinteraksi semakin banyak dan hubungannya semakin kompleks. Individu mulai berhubungan dengan teman-teman sebaya di luar rumah. Peraturan-peraturan yang berlaku di luar keluarganya secara bertahap juga mulai dipahami. Bersamaan dengan

itu, anak mulai menyadari bahwa ada norma tertentu yang berlaku di luar keluarganya.

#### 4. Tahap penerimaan norma kolektif (Generalized Stage)

Pada tahap ini seseorang telah dianggap dewasa. Dia sudah dapat menempatkan dirinya pada posisi masyarakat secara luas. Dengan kata lain, ia dapat bertenggang rasa tidak hanya dengan orang-orang yang berinteraksi dengannya tapi juga dengan masyarakat luas. Manusia dewasa menyadari pentingnya peraturan, kemampuan bekerja sama bahkan dengan orang lain yang tidak dikenalnya secara mantap. Manusia dengan perkembangan diri pada tahap ini telah menjadi warga masyarakat dalam arti sepenuhnya.

### B. Internalisasi Belajar dan Spesialisasi

Ketiga kata atau istilah internalisasi, belajar, dan spesialisasi pada dasarnya memiliki pengertian yang hampir sama. Proses berlangsungnya sama yaitu melalui interaksi sosial. Istilah internalisasi lebih ditekankan pada norma-norma individu yang menginternalisasikan norma-norma tersebut, atau proses norma-norma kemasyarakatan yang tidak berhenti sampai institusional saja, akan tetapi norma tersebut mendarah daging dalam jiwa anggota masyarakat. Norma tersebut dapat dibedakan menjadi dua, yaitu norma yang mengatur pribadi (mencakup norma kepercayaan dan kesusilaan) dan norma yang mengatur hubungan pribadi (mencakup kaidah kesopanan dan kaidah hukum).

Istilah belajar ditekankan pada perubahan tingkah laku, yang semula tidak dimiliki sekarang telah dimiliki oleh seorang individu, atau perubahan sikap dari tidak tahu menjadi tahu, dimana belajar dapat berlangsung di lingkungan maupun di lembaga pendidikan.

Istilah spesialisasi ditekankan pada kekhususan yang telah dimiliki atau diukur oleh seorang individu, kekhususan timbul melalui proses yang agak panjang dan lama.

### C. Masalah-masalah generasi muda

Berbagai permasalahan generasi yang muncul pada saat ini antara lain :

- a) Menurunnya jiwa idealisme, patriotisme, dan nasionalisme dikalangan masyarakat, termasuk jiwa pemuda.
- b) Kekurang pastian yang dialami oleh generasi muda terhadap masa depannya.
- c) Belum seimbangya antara jumlah generasi muda dengan fasilitas pendidikan yang tersedia, baik formal dan informal. Tingginya jumlah putus sekolah yang tidak hanya merugikan generasi muda sendiri, tetapi juga merugikan bangsa.
- d) Kekurangan lapangan dan kesempatan kerja serta tingginya tingkat pengangguran dan setengah pengangguran dikalangan generasi muda mengakibatkan berkurangnya produktivitas nasional dan memperlambat kecepatan laju perkembangan pembangunan nasional serta dapat menimbulkan berbagai problem sosial lainnya.
- e) Kurangnya gizi yang menghambat perkembangan kecerdasan, dan pertumbuhan.
- f) Masih banyaknya perkawinan dibawah umur.
- g) Pergaulan bebas yang membahayakan sendi-sendi moral bangsa.
- h) Merebaknya penggunaan NAPZA dikalangan remaja
- i) Belum adanya peraturan perundangan yang menyangkut generasi muda.

Dalam rangka memecahkan permasalahan generasi muda diatas, diperlukan usaha-usaha terpadu, terarah dan berencana dari seluruh potensi nasional dengan melibatkan generasi muda sebagai subjek pembangunan. Organisasi-organisasi pemuda yang telah berjalan baik merupakan potensi yang siap untuk dilibatkan dalam kegiatan pembangunan nasional.

### D. Potensi Kepemudaan

Potensi-potensi yang terdapat pada generasi muda yang perlu dikembangkan adalah sebagai berikut :

- 1) Idealisme dan Daya Kritis

Secara sosiologis generasi muda belum mapan dalam tatanan yang ada, sehingga ia dapat melihat kekurangan dalam tatanan dan secara wajar mampu mencari gagasan baru. Pengejawantahan idealisme dan daya kritis perlu dilengkapi landasan rasa tanggung jawab yang seimbang.

## 2) Dinamika dan Kreativitas

Adanya idealisme pada generasi muda, menyebabkan mereka memiliki potensi kedinamisan dan kreativitas, yakni kemampaun dan kesediaan untuk mengadakan perubahan, pembaharuan, dan penyempurnaan kekurangan yang ada ataupun mengemukakan gagasan yang baru.

## 3) Keberanian Mengambil Resiko

Perubahan dan pembaharuan termasuk pembangunan, mengandung resiko dapat meleset, terhambat atau gagal. Namun, mengambil resiko itu diperlukan jika ingin memperoleh kemajuan. Generasi muda dapat dilibatkan pada usaha-usaha yang mengandung resiko. Untuk itu diperlukan kesiapan pengetahuan, perhitungan, dan keterampilan dari generasi muda sehingga mampu memberi kualitas yang baik untuk berani mengambil resiko.

## E. Peranan Sosial Mahasiswa dan Pemuda di Masyarakat

Peranan Sosial Mahasiswa bisa dikatakan pemuda yang aktif dan berintelektual yang akan berperan sebagai generasi yang diharapkan akan meneruskan generasi sebelumnya, yang akan membangun negaranya menjadi lebih baik (maju). Sedangkan Pemuda adalah seseorang Individu atau kelompok yang berperan aktif didalam masyarakat dan bisa dikatakan Mahasiswa atau tidak, karena belum semua pemuda yang berintelektual mampu secara ekonomi untuk menjenjang pendidikan yang lebih tinggi, karena biaya pendidikan yang semakin mahal. Bisa dikatakan Pemuda memiliki Sosialisasi yang tinggi yang dapat berperan penting dilingkungan masyarakat khususnya bersosialisai untuk menjadi penengah didalam lingkungan sekitar maupun secara luas.

### 3.1.2 Identifikasi Permasalahan Keolahragaan

Indonesia adalah lahannya atlet muda berbakat. Indonesia merupakan lahannya ekspresi kehidupan berolahraga seluas-luasnya. Dan Indonesia merupakan gudangnya permasalahan olahraga yang tak kunjung habis.

Hal ini diyakini karena manusia dan system yang dibangun dalam keadaan 'bobrok'. Bagaimana tidak fakta membuktikan, **pertama** membangun mentalitas manusia Indonesia yang kian hari kian merosot, mulai dari pengaruh politik yang berdampak pada perekonomian sehingga muncul 'kebringasan' mental manusia Indonesia untuk bersaing mendapatkan sesuap nasi dengan cara apapun. Pola pendidikan yang bersifat formalitas dan menekan sehingga pencerdasan moral tidak dianggap terlalu penting dalam peningkatan SDM. **Kedua**, system yang dibangun dalam olahraga Indonesia penuh dengan kepentingan baik pribadi maupun kelompok. Ini yang akan menjadi boomerang dalam peningkatan prestasi olahraga yang harus diperbaiki.

#### A. Pemasarakatan dan Pemberdayaan Olah Raga

Dari aspek kejiwaan, olahraga atau aktivitas jasmani yang dilakukan hingga intensitas memadai, moderat, sangat efektif sebagai wahana untuk meningkatkan ketahanan terhadap stres dan menanggulangi depresi. Dari aspek ekonomi, data yang diperoleh misalnya dari Korea dan Australia menunjukkan prospek olahraga yang sangat positif untuk ikut serta meningkatkan ekonomi melalui beberapa segmen industri olah raga, di antaranya peralatan dan perlengkapan serta konstruksi fasilitas olahraga.

Melalui pendekatan pembelajaran keterampilan taktis misalnya, diketahui bahwa pendidikan jasmani dan olahraga efektif untuk membina keterampilan berpikir kritis dan kreatif. Karena itu, para peneliti sampai pada kesimpulan bahwa aktivitas jasmani atau olahraga sangat bermanfaat untuk memupuk kemampuan memecahkan masalah.

Tentunya kita sepaham bahwa pendidikan jasmani merupakan peletak dasar untuk segala aspek meliputi fisik, mental, intelektual, sosial, dan emosional spiritual. Kecakapan berolahraga di sepanjang hayat untuk mengisi waktu luang

dengan kegiatan yang bermanfaat, memerlukan pembekalan keterampilan sejak awal. Kita dapat menilai seberapa jauh kultur olahraga sudah berkembang di suatu masyarakat atau negara bergantung pada kebiasaan mengisi waktu luang dengan aktivitas jasmani secara aktif. Dalam kaitan ini maka antara olahraga masyarakat (rekreasi), selalu ada interaksi dengan olahraga kompetitif-prestasi dalam suasana saling mendukung dan menunjang.

Berdasarkan paparan singkat itu sangat jelas bahwa subsistem pendidikan jasmani atau olahraga pelajar/mahasiswa tidak boleh terbengkalai pembinaannya dan termasuk ke dalam kebijakan umum. Olahraga masyarakat (rekreasi) merupakan kegiatan "penyedap" dan penggairah dalam rangka membangun kembali vitalitas hidup. Kegiatan itu ikut serta membangun sebuah mood kejiwaan yang sehat.

Ancaman yang dibangkitkan oleh gaya hidup pasif, mendatangkan persoalan yang sangat merugikan kehidupan manusia dengan aneka bentuk penyakit degeneratif, penyakit kurang gerak. Obesitas, alias kegemukan, sudah menjadi sebuah masalah internasional dengan rangkaian akibat yang terkait langsung seperti terserang penyakit jantung koroner, diabetes melitus, kolesterol tinggi, dan lain yang sejenis.

Olahraga dan kesehatan memiliki kaitan langsung dengan ekonomi. Kita dapat belajar dari pengalaman Australia. Di sana, kesehatan dan olahraga sudah mengakar. Setiap peningkatan partisipasi penduduk dalam berolahraga hingga 5% akan mengurangi anggaran perawatan kesehatan sebesar 439 juta dolar. Secara umum pernah diungkapkan oleh sebuah riset, bahwa investasi sebesar 1 dolar untuk aktivitas jasmani atau olahraga akan menghemat biaya perawatan kesehatan sebesar 3,2 dolar.

#### B. Peningkatan Prestasi Olahraga

Olahraga telah lama menjadi instrumen pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa. Peran ini bukan hanya diperlihatkan dalam ajang Pekan Olahraga Nasional (PON) I yang terkesan heroik, tetapi juga diperlihatkan dalam berbagai even olahraga yang digelar sebelumnya. Kini, lingkungan strategis olahraga telah berubah. Tantangan yang dihadapi bangsa-bangsa bukan melepaskan diri dari belenggu kolonialisme, tetapi memacu persaingan dan mengejar kesetaraan



dalam hubungan antarbangsa. Dalam lingkup global, terjadi peningkatan kesadaran akan saling ketergantungan antarbangsa melalui difusi kultur olahraga. Dalam konteks ini, permasalahan sistem keolahragaan nasional tidak terlepas dari tekanan politik, ekonomi, dan budaya global.

Ada beberapa hal yang harus diperbaiki dalam mengelola olahraga di Indonesia yaitu, dengan penanaman nilai, norma dan moral dalam berperilaku. Kemudian Pengoptimalan penangan pemerintah dalam menangani permasalahan olahraga sesuai dengan UU RI no. 3 2005 pasal BAB VIII tentang Pengelolaan Keolahragaan. Pengoptimalan peran lembaga pendidikan tinggi olahraga. peningkatan peran lembaga/bidang penelitian dan pengembangan olahraga dengan membuka wacana baru bahwa olahraga bukan saja mengedepankan otot tapi juga otak dalam rangka peningkatan pengembangan olahraga yang bersifat inovatif. Peningkatan pemahaman dan penerapan pendidikan jasmani dan olahraga, dengan begitu kultur cinta terhadap olahraga bisa tumbuh dalam benak masyarakat Indonesia sehingga ke depannya olahraga tidak hanya dijadikan hobi semata, tetapi olahraga bisa dijadikan sebuah profesi yang prestatif. Untuk itu dibutuhkan upaya dari berbagai pihak,; masyarakat, pecinta olahraga, serta pemerintah untuk membuat kondisi olahraga Indonesia keluar dari keterpurukan.

Prioritas riset dan pengembangan bisa diletakkan dalam upaya reservasi jenis olah raga tradisional yang menjadi bagian dari pranata sosial budaya masyarakat namun mulai ditinggalkan pendukungnya. Selain itu, riset dan pengembangan pun perlu diarahkan pada penyediaan peralatan dan perlengkapannya sehingga tidak sepenuhnya bergantung kepada produk luar negeri yang mahal. Pemajuan aspek-aspek di atas membutuhkan keterlibatan semua pihak. Tidak hanya keterlibatan jajaran pemerintahan daerah, tetapi juga keterlibatan dan prakarsa para pengusaha, tokoh masyarakat, dan elemen lain. Sudah saatnya prestasi Nasional beranjak pada level yang lebih bergengsi. Hal ini bukan perkara yang absurd, mengingat potensi yang dimiliki masyarakat Indonesia lebih dari memadai. Bukan hanya potensi atlet, tetapi juga potensi dalam pembinaan. Karena itu, kata kunci kemajuan olahraga nasional adalah membangun sinergi, dalam menjadikan olahraga sebagai budaya masyarakat dan pembinaan olahraga prestasi Nasional.

Kita tak akan bergeser dari komitmen lama untuk menempatkan olahraga sebagai bagian integral dari pembangunan. Dengan demikian, olahraga ditempatkan bukan sekadar merespons tuntutan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya, tetapi ikut bertanggung jawab untuk memberikan arah perubahan yang diharapkan. Keteguhan terhadap komitmen tersebut didukung oleh begitu banyak fakta dan pengalaman bahwa olahraga yang dikelola dan dibina dengan baik akan mendatangkan banyak manfaat bagi warga masyarakat. Seperangkat nilai dan manfaat dari aspek sosial, kesehatan, ekonomi, psikologis dan pedagogis merupakan landasan yang kuat untuk mengklaim bahwa olahraga merupakan instrumen yang ampuh untuk melaksanakan pembangunan yang seimbang antara material, mental, dan spiritual. Dari aspek sosial diakui bahwa olahraga merupakan sebuah aktivitas yang unik karena sangat potensial untuk memperkuat integrasi sosial. Secara bertahap dan bersusun dari unit kecil (misalnya, klub), komitmen emosional pada satu tujuan bersama dapat meningkat ke tingkat komunitas, masyarakat sebuah daerah hingga ke jenjang nasional. Itulah sebabnya olahraga, seperti yang sering kita alami dalam olahraga kompetitif, dipandang ampuh untuk membangun persatuan dan kesatuan nasional.

Sementara dalam skala nasional, perubahan paradigma pembangunan nasional ke arah desentralisasi diikuti pula perubahan dalam kebijakan pembinaan olahraga yang searah dengan demokratisasi dalam segala bidang. Pembinaan olahraga akan lebih banyak melibatkan partisipasi dan prakarsa masyarakat. Perubahan ini semestinya diikuti oleh pemberdayaan masyarakat di bidang olahraga yang seperti tertuang dalam Undang-undang Keolahragaan No 03 2005. Selaras dengan semangat zaman, derajat partisipasi masyarakat dalam pembangunan olahraga akan menentukan postur dan kemajuan pembangunan olahraga suatu daerah. Masyarakat bukan hanya perlu didorong dalam menjadikan olahraga sebagai kebutuhan, tetapi juga mengambil peran dalam memajukan olahraga daerah.

Sedangkan dalam hal pembinaan olahraga prestasi perlu didukung peningkatan sarana prasarana olahraga dan sumberdaya manusia yang kompeten. Pembinaan olahraga prestasi diletakkan di atas landasan pendidikan jasmani dalam berbagai jenis dan jenjang pendidikan. Pembinaan dilakukan dengan memperhatikan beberapa kecenderungan berikut. Pertama, introduksi dan penerapan teknologi

olahraga untuk mendorong efisiensi pembinaan olahraga prestasi. Sayangnya industri olahraga dalam negeri baru sebatas memperoleh hak paten untuk memproduksi peralatan olahraga. Hal ini menunjukkan betapa tertinggalnya riset dan pengembangan dalam bidang keolahragaan, baik di perguruan tinggi maupun di lembaga riset swasta dan milik pemerintah.

Sama sekali tak dapat diabaikan perkembangan dan trend olahraga kompetitif untuk berprestasi meskipun ada ayunan perubahan yang mengarah kepada perolehan keuntungan yang bersifat material; ada pergeseran dari amateur ke profesional, paling tidak di tubuh Komite Olimpiade Internasional (IOC) yang dirintis semasa kepemimpinan Presiden IOC, Juan Antonio Samaranch.

Banyak negara, meski dengan jumlah penduduk sedikit, mampu berprestasi dalam olahraga, seperti yang diraih oleh Australia dalam Olimpiade Sydney 2000 dan Olimpiade Athena 2004. Jawabannya, sebagian karena faktor penentu berupa tingkat kepuasan hidup. Kemerosotan Rusia misalnya, lebih banyak karena keterbatasan dana untuk mengoperasikan sistem. Mereka bisa sekadar bertahan untuk memelihara sistem yang sudah mantap, tetapi sukar untuk mencapai hasil optimal karena faktor ekonomi.

Mungkin tanpa kita sadari, pada tataran lingkungan yang lebih luas ada beberapa faktor yang berpengaruh terhadap arah, isi dan bahkan cara mengelola olahraga. Sistem politik mempengaruhi model pembinaan dan institusi yang menanganinya. Sistem ekonomi memengaruhi struktur pembiayaan yang terkait dengan kemampuan kita mempertahankan kesinambungan sistem. Struktur pendidikan mempengaruhi seberapa banyak peluang dan keterlaksanaan pendidikan jasmani yang menjadi dasar bagi perkembangan olahraga.

Jumlah penduduk berpengaruh terhadap jumlah anak dan kaum muda sebagai calon olahragawan sehingga penduduk yang besar seperti di Indonesia merupakan sebuah aset yang luar biasa nilainya. Jadi dibutuhkan upaya, seiring dengan pendidikan, untuk mengubah faktor penduduk bukan sebagai beban tetapi sebagai modal. Tanpa aspirasi yang kental terhadap olahraga, maka suatu daerah sulit berkembang dalam olahraga. Seberapa efektif mekanisme penelusuran dan promosi bakat telah dilaksanakan yang berarti kegiatan di klub usia dini dan olahraga di sekolahan merupakan tempat menyemai bibit-bibit. Komponen itu akan berkembang subur bila didukung oleh komponen pelatihan

yang semakin membaik, seperti halnya struktur kompetisi yang semakin kuat ditinjau dari volume atau kekerapan pelaksanaan, termasuk kualitasnya.

Namun demikian, unsur pelatih termasuk kualifikasinya sangat menentukan. Pelatihan yang berbasis pengetahuan dan teknologi merupakan alternatif yang tak bisa ditawar-tawar. Adalah sebuah mimpi untuk tetap mempertahankan hegemoni (misalnya di kawasan ASEAN) atau menerobos prestasi olimpiade tanpa pelatih yang andal dan dukungan lab beserta para ahli pendukung terkait seperti biomekanika dan psikologi olah raga, selain aspek sport medicine.

Dari sisi struktur venues atau sarana dan prasarana olahraga, kita di Indonesia sangat lemah baik dari sisi jumlah maupun mutu, sehingga tidak memungkinkan untuk dapat dikembangkan standar pelatihan bermutu tinggi. Untuk bisa bersaing di tingkat internasional, sudah tak mungkin lagi pelatihan dilakukan secara sambil lalu atau paruh waktu. Model-model pelatihan mutakhir menuntut volume pelatihan yang besar dan penempatan pelatihan secara terpadu.

Atas dasar alasan inilah, Australia memiliki 8 sentra pelatihan, Spanyol 31, Prancis 21 dan AS yang berbasis pada sekolah dan universitas mendirikan "Olympic Training Camp" di Colorado.

Kita di Indonesia merintis pendirian sentra ini seperti pendirian Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar (PPLP) sebanyak 93 buah dan Pusat Pendidikan dan Latihan Mahasiswa (PPLM) sebanyak 15 buah yang tersebar di seluruh Indonesia. Embrio dari pusat pelatihan daerah (PPLD) yang idealnya ada di setiap provinsi, juga masih memerlukan pembenahan. Konsep dasarnya ialah bagaimana mengintegrasikan kegiatan pelatihan dan pendidikan secara serasi yang didukung oleh logistik.

Menyedihkan sekali nasib mantan atlet ini yakni Abdul Madjid, sprinter 100 meter dan 200 meter pada tahun 1960-an asal Kalimantan Selatan, Ubannya memutih dan bentuk tubuhnya sudah berubah, bertambah gemuk. Dalam usianya sudah mencapai 60 tahun, ia belum berkeluarga dan masih tinggal di rumah kontrakan. Untuk mencari nafkah ia menjual tenaganya sebagai buruh di Pelabuhan Tri Sakti. Masih banyak Madjid lainnya yang senasib. Tata latar inilah yang mendorong Ditjen Olahraga pada dua tahun terakhir ini mengembangkan sistem penghargaan dalam bentuk program konseling karier atlet. Di Australia disebut

program Pendidikan Karier Atlet (PKA). Motonya: Kita tak mampu memberi ikannya, tetapi hanya dapat memberi kailnya.

Itulah masalah yang masih tersisa dan tak akan pernah tuntas penyelesaiannya karena selalu terjadi perubahan dinamis. Masalah umum yang sedang dihadapi dunia olahraga di Indonesia, seperti :

- a. Pembinaan olahraga yang belum terarah.
- b. Lemahnya peran lembaga/bidang penelitian dan pengembangan olahraga.
- c. Masih terbatasnya sarana dan prasarana olahraga.
- d. Masih sulitnya pemanfaatan fasilitas olahraga karena masih terbatas.

Masalah sarana dan infrastruktur yang kurang memadai menjadi faktor lain mengapa olahraga Indonesia belum mengalami kemajuan yang signifikan. Kurangnya gedung indoor olahraga atau kualitas rumput lapangan sepak bola yang kurang adalah beberapa contoh permasalahan kurang memadainya infrastruktur olahraga di Indonesia.

Indonesia mengalami masalah klasik dalam olahraga terutama dalam hal Pemusatan Pelatihan Nasional yang mengakibatkan mandeknya prestasi Indonesia dalam ajang internasional. Selama Pemusatan Pelatihan Nasional (Pelatnas) masalah yang muncul yaitu uang saku atlet yang terlambat, biaya akomodasi terlambat, anggaran uji coba ke luar terlambat, peralatan terlambat, lokasi Pelatnas tidak terpusat dan tidak jelasnya pihak yang memimpin dan bertanggungjawab antara Kemenpora, Satlak Prima, KOI serta KONI. Akan tetapi permasalahan juga sudah terjadi sebelum Pelatnas dimulai. Seperti atlet, apakah atlet yang dikirim merupakan yang terbaik di bidangnya mengingat 80 persen cabang olahraga tidak memiliki kompetisi nasional dan internasional di dalam negeri yang berkualitas dan rutin.

Terbatasnya venue untuk latihan dan pertandingan tingkat internasional termasuk untuk anak usia dini, kepengurusan tingkat nasional dan daerah yang tidak aktif, sekolah olahraga semakin tidak menghasilkan atlet bermutu, fasilitas jelek dan masih sangat terbatas jumlahnya.

Dengan berdirinya Menpora sekarang ini, kegiatan utama yang perlu dilaksanakan ialah memperkuat kesisteman yang sudah dirintis dalam sejumlah

wilayah kunci yang menjadi fokus pemecahan. Karena itu, sangat dibutuhkan sebuah dokumen yang kukuh tentang "Arah Strategis dan Manajemen Pembangunan Keolahragaan Nasional", yang kemudian berfungsi sebagai pemberi arah dan sekaligus sebagai alat untuk memantau perubahan dan perkembangan program.

Dalam pengembangan rencana strategis, perlu diperhatikan beberapa kaidah seperti prinsip inklusif yang menekankan keikutsertaan semua warga masyarakat melalui pemberian kesempatan dan akses untuk berolahraga. Perlu diupayakan lingkungan yang sehat dan aman, layanan yang mudah diperoleh, manajemen yang transparan, dan akuntabel serta penerapan sistem pengukuh berupa penghargaan dan penciptaan rasa aman di kalangan pelatih dan atlet.

Komitmen untuk melaksanakan dan menyepakati arah strategis pembangunan keolahragaan nasional itu diperkuat oleh komunikasi dan koordinasi, selain mesti terjamin sisi keberlanjutannya.

**Pertama**, harus ada target jelas sebagai pembinaan jangka panjang prestasi olahraga yaitu Olimpiade dan Asian Games harus dijadikan rujukan utama sementara cabang yang belum berpeluang meraih medali Olimpiade dan Asian Games diminta fokus dalam SEA Games dan PON. Belajar dari China yang sejak 1979 membuat target besar peringkat pertama Olimpiade tahun 2000 dengan program "Jugo Tichi" di mana 150 atlet muda dipersiapkan untuk cabang-cabang terpilih yang disesuaikan dengan keunggulan fisik China yaitu kecepatan, kelenturan, keindahan dan daya lecut. Cabang tersebut adalah bulu tangkis, tenis meja, angkat besi, atletik, senam, renang, bela diri, termasuk sepak bola dan bola basket yang semakin digemari di China.

**Kedua**, pemerintah lebih baik membentuk Satuan Pelaksana Pemandu Bakat yang bertugas mencari bakat atlet usia dini dengan melakukan audiensi di beberapa daerah untuk beberapa cabang olimpiade yang pasti akan menggairahkan semangat masyarakat menjadi olahragawan. Setelah terpilih bakat atlet muda tersebut, langkah selanjutnya adalah pembinaan yang artinya Indonesia harus membangun sekolah olahraga di beberapa daerah dengan fasilitas yang lengkap sebagai pusat pembinaan atlet muda tersebut. Hal tersebut harus dilakukan secara simultan yang disertai dengan menghidupkan kompetisi untuk menjaga tingkat persaingan para atlet dalam pembinaan. Jika hal ini tidak

dilakukan saya rasa sulit Indonesia mengejar ketertinggalan prestasi di bidang olahraga ini.

### 3.1.2 Identifikasi Permasalahan Pariwisata

Dalam pengembangan kegiatan pariwisata diperlukan pengaturan-pengaturan alokasi ruang yang dapat menjamin sustainable development guna mencapai kesejahteraan masyarakat. Hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip dasar dalam penataan ruang yang bertujuan untuk meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya buatan secara berdaya guna, berhasil guna, dan tepat guna.

#### A. Promosi Pariwisata

Promosi pariwisata di Indonesia hingga kini belum efektif karena sejumlah masalah krusial masih dihadapi dalam pengembangan pariwisata di Tanah Air. Kendala yang dihadapi selama ini adalah konektivitas dan koordinasi lintas sektor. Kita boleh promosi di mana-mana, tetapi penerbangan langsung sulit dan kapal yang langsung juga tidak ada, hal ini tidak akan ada gunanya.

Selain kendala konektivitas, koordinasi lintas sektor juga sangat lemah. Hal itu sangat tidak menunjang peningkatan kunjungan wisatawan ke Indonesia.

Fakta menunjukkan bahwa penerbangan langsung dari negara-negara yang memiliki potensi pasar wisata yang besar juga tidak ada. Juga akses langsung pelayaran kapal pesiar, misalnya, masih sangat minim. Untuk bisa datang ke Indonesia, wisatawan harus menyinggahi beberapa negara dan harus ditempuh dalam beberapa jam. Kendala lain yang dihadapi, adalah dana promosi dan SDM dari manajemen pengelola pariwisata. Selama ini dana dari pemerintah untuk promosi tidak pernah transparan, bahkan BPPI sendiri tidak mengetahui berapa besar dana yang diperuntukkan promosi pariwisata. Yang ada selama ini adalah pemerintah memfasilitasi untuk berbagai kegiatan di berbagai negara, seperti promosi, pameran, dan pementasan seni budaya. BPPI disuruh mencari 'bayer' sebanyak-banyaknya atau mengajak pengusaha sebanyak-banyaknya.

Sinkronisasi kebijakan di pusat dan daerah serta kelemahan data terkait kunjungan wisatawan juga disebut sebagai hambatan yang dihadapi dalam pengembangan promosi pariwisata di daerah. Peningkatan anggaran pariwisata perlu didukung sinkronisasi kebijakan di pusat dan daerah. seperti dalam kebijakan pembebasan visa.

Kalau Indonesia ingin mendatangkan 10 juta wisatawan, harus mengeluarkan biaya sebanyak 10 juta dolar AS. Beberapa negara di Asia yang sudah sukses mendatangkan wisatawan juga melakukan hal yang sama. Oleh karena itu, kata dia, Indonesia perlu belajar dari Singapura yang sudah bisa mendatangkan 12 juta wisatawan per tahun dan Malaysia yang sudah bisa mendatangkan 22 juta wisatawan per tahun. Belajar dengan negara tetangga, bagaimana strategi yang mereka lakukan untuk menggaet wisatawan, padahal kalau dari potensi wisata kita, lebih kaya daripada mereka. Akan tetapi, buktinya lebih banyak kedatangan turis.

Dalam promosi pariwisata, masalah komunikasi dan publisitas dapat ditingkatkan dengan pemanfaatan teknologi informasi. Melalui pemanfaatan teknologi informasi yang massif akan sangat membantu promosi wisata saat ini.

## B. Pengembangan Destinasi dan Objek Wisata

Dalam pengembangan kegiatan pariwisata diperlukan pengaturan-pengaturan alokasi ruang yang dapat menjamin sustainable development guna mencapai kesejahteraan masyarakat. Hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip dasar dalam penataan ruang yang bertujuan untuk meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya buatan secara berdaya guna, berhasil guna, dan tepat guna. Pengembangan pariwisata berkaitan erat dengan pengembangan destinasi, dimana terdapat permasalahan seperti berikut;

1. Penataan kawasan wisata masih sering terlihat kurang mengikuti kaedah teknis penataan ruang, misalnya memanfaatkan kawasan yang mempunyai kemiringan lereng tidak layak untuk dikembangkan namun tetap dibangun menjadi obyek pariwisata, seperti pembangunan sarana akomodasi, yang dapat menimbulkan dampak negatif terhadap upaya pariwisata itu sendiri. Contohnya permandian air panas di Kab. Mojokerto



Jawa Timur yang beberapa waktu yang lalu terjadi bencana banjir bandang yang mengakibatkan kerugian jiwa dan material yang sangat besar. Contoh lain yaitu pengendalian yang masih belum efektif terhadap pembangunan fasilitas pariwisata yang merambah ke kawasan lindung yang diduga menjadi salah satu penyebab terjadinya erosi dan banjir, seperti yang terjadi di kawasan pariwisata puncak.

2. Permasalahan lainnya yaitu pengembangan kegiatan pariwisata masih fokus hanya pada pengembangan aspek fisik saja, seperti hanya mengembangkan karena potensi alamnya seperti Danau Toba, karena potensi situs seperti Borobudur. Saat ini dalam pengembangan kegiatan pariwisata belum terlihat upaya menciptakan obyek pariwisata baru yang bersifat non-fisik, seperti dengan mengembangkan potensi kebudayaan yang dimiliki oleh daerah tersebut, apakah upacara adat yang dimiliki atau kegiatan unik yang ada contohnya tempat penangkaran buaya di daerah Medan berpotensi untuk dikembangkan sebagai tempat wisata nasional. Sebenarnya masih banyak potensi-potensi pariwisata lainnya yang dapat dikembangkan yang terkait dengan aspek budaya, seperti misalnya Tanah Toraja, Taman Laut Bunaken, sebagaimana diusulkan dalam RTRWN.
3. Konflik antar sektor juga masih sering terjadi dalam mengembangkan kegiatan pariwisata, seperti misalnya konflik antar sektor pertanian dengan sektor pariwisata yang terjadi Bali, dimana pengembangan kawasan wisata di Bali mempengaruhi penyediaan air baku untuk kawasan pertanian.
4. Permasalahan-permasalahan dalam konteks lokal yang sering ditemui antara lain dalam pelaksanaan kegiatan pariwisata, masih banyak terjadi masyarakat yang berada di dalam kawasan wisata tersebut masih belum ikut "memiliki", manfaat yang dihasilkan belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat di sekitarnya hanya dirasakan oleh para investor saja.
5. Keterbatasan dukungan sarana dan prasarana penunjang merupakan juga salah satu permasalahan yang perlu mendapat perhatian. Dimana dukungan sarana dan prasarana merupakan faktor penting untuk keberlanjutan penyelenggaraan kegiatan pariwisata, seperti penyediaan akses, akomodasi, angkutan wisata, dan sarana prasarana pendukung lainnya. Masih banyak kawasan wisata yang sangat berpotensi tetapi masih belum didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai. Selain

itu sarana dan prasarana yang dibangun hanya untuk kepentingan lokal saja, belum dapat melayani kebutuhan penyelenggaraan pariwisata di luar lokasi. Seperti misalnya penyediaan angkutan wisata hanya tersedia di area kawasan wisata saja, tetapi sarana angkutan untuk mencapai kawasan tersebut dari akses luar belum tersedia.

6. Kebijakan & peraturan yang berlaku dalam lingkup negara dan daerah
7. SDM Pariwisata
8. Kesiapan masyarakat
9. Investasi yang belum banyak berkembang

Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah dikelompokkan masalah pokok dengan uraian masalah dan akar masalah untuk mendapatkan daftar permasalahan yang mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah, dengan tabel sebagai berikut :

TABEL 3.1

**Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah**

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	MASIH KURANGNYA PRESTASI PEMUDA DAN OLAH RAGA TINGKAT NASIONAL	KURANGNYA KEMANDIRIAN PEMUDA	Belum tercapainya jumlah pemuda pelopor dari target daerah
			Belum tercapainya jumlah pemuda mandiri dari target
			Fasilitasi peran serta pemuda dalam pembangunan dari target
			Tingkat Pemahaman pemuda terhadap bahaya narkoba dari target
		BELUM OPTIMALNYA PEMBINAAN CABOR BERPRESTASI	Pemenuhan sarana dan prasarana Olah raga dari rencana
			Pembinaan dan pengembangan olah raga di masyarakat dari target
			Pembinaan dan pengembangan cabang olah raga dari target

2	MASIH KURANGNYA LAMA TINGGAL WISATAWAN	BELUM OPTIMALNYA PEMBENTUKAN DAN PENGEMBANGAN DESTINASI	Pemenuhan sarana dan prasarana pariwisata dari rencana
			Pengembangan Objek Pariwisata dari rencana
			Pembinaan Sumber daya Pariwisata dari target
		KURANG OPTIMALNYA PROMOSI PARIWISATA	Terlaksananya Kerjasama Pariwisata dari target
			Pengembangan Atraksi Pariwisata dari rencana
			Pengembangan ekonomi kreatif pariwisata dari target

### 3.2 TELAHAH VISI, MISI DAN PROGRAM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SERANG TERPILIH

#### 3.2.1 VISI

TERWUJUDNYA KOTA PERADABAN YANG BERDAYA DAN BERBUDAYA

**KOTA PERADABAN** dimaknai sebagai Civil Society yaitu kondisi pemerintahan dan masyarakat Kota Serang yang berciri :

1. Adanya toleransi (tenggang rasa) untuk tujuan kerukunan dan kedamaian;
2. Adanya pluralism yaitu sikap yang mau menerima dengan tulus ikhlas suatu kondisi warga Kota Serang yang majemuk.
3. Adanya keadilan sosial, bermakna setiap warga negara mendapatkan hak dan kewajibannya secara seimbang dalam kehidupan sosial, terjamin keadilan untuk memperoleh pendidikan, kesehatan dan penghidupan yang layak;
4. Adanya partisipasi sosial, yaitu setiap warga negara berhak dan berkewajiban untuk ikut serta dalam berpolitik dengan rasa tanggung jawab secara bersih tanpa adanya paksaan atau intimidasi dari pihak manapun;
5. Adanya demokratisasi yaitu sebuah proses dalam menegakkan prinsip-prinsip demokrasi demi terciptanya warga Kota Serang yang menjunjung tinggi azas-azas demokrasi;

6. Adanya supremasi hukum, ditandai penegakan hukum yang seadil-adilnya terhadap warga Kota Serang tanpa pandang bulu, tidak tumpul ke atas tajam ke bawah;
7. Tersedianya ruang bebas publik, sebagai tempat bagi warga Kota Serang untuk melakukan aktivitas publiknya secara bebas dan bertanggung jawab seperti dalam hal berorganisasi, berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapat termasuk memublikasikannya kepada publik tanpa adanya tekanan dari pihak manapun.

**KOTA BERDAYA** bermakna Kota Serang mampu menunjukkan keunggulan berkomparasi dan berkompetisi diberbagai bidang kehidupan. Kota Serang akan menjadi Kota Peradaban yang didukung oleh kondisi perkotaan yang kondusif dan modern dengan tetap memperhatikan lingkungan berkelanjutan demi kemajuan Kota Serang

**KOTA BERBUDAYA** merupakan setiap perilaku kehidupan masyarakat yang dilandasi oleh etos kerja, tata cara, adat istiadat, tradisi, kearifan lokal, norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat serta diyakini sebagai nilai-nilai budi pekerti yang luhur yang diwujudkan dalam perilaku interaksi sosial sebagai identitas pada penyelenggaraan pemerintahan dan program pelaksanaan pembangunan

Visi tersebut mengandung pengertian bahwa selama tahun 2019 hingga 2023 Kota Serang diharapkan menjadi kota yang dihuni oleh masyarakat yang senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai agama, etos kerja, tata cara, adat istiadat, tradisi, norma kearifan lokal yang hidup dan berkembang dan diyakini sebagai nilai-nilai yang luhur yang diwujudkan dalam perilaku interaksi sosial serta sadar menggunakan hak dan kewajibannya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, sehingga terwujud kehidupan pemerintahan dan kemasyarakatan yang teratur, sejahtera dan didukung oleh aktivitas ekonomi utama berupa perdagangan, jasa, industri pengolahan, pertanian, perikanan dan pariwisata serta ditunjang oleh standar pelayanan kota berskala metropolitan yang mampu melayani seluruh aktivitas masyarakat kota dan daerah *hinterland*-nya dengan aman, tentram, nyaman, lancar, asri, sehat dan berkelanjutan.

Melalui keberdayaan dan kebudayaan, diharapkan kesejahteraan masyarakat Kota Serang akan semakin meningkat melalui pemenuhan kebutuhan pendidikan, kesehatan, pelayanan dasar maupun sarana dan prasarana penunjang. Peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Serang tersebut tercermin melalui peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan pertumbuhan ekonomi, serta penurunan angka kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka.

Dalam rangka mewujudkan visi diperlukan semangat baru dalam pelaksanaan pembangunan yang berlandaskan nilai dasar bangsa Indonesia dan masyarakat Kota Serang khususnya, yakni kegotongroyongan. Semangat baru tersebut tertuang dalam slogan:

### **“Aje Kendor Membangun Serang”**

Makna slogan Aje Kendor Membangun Serang diartikan satu sikap yang terwujud dalam bentuk inisiatif dan penuh semangat untuk menyumbangkan tenaga dan pikiran dalam rangka membangun Kota Serang. Sikap ini diperlukan untuk menumbuhkan kesadaran dan kecintaan aparatur dan masyarakat akan kotanya. Melalui pernyataan ini akan timbul sikap kepeloporan, sinergi dan kolaborasi untuk menjaga kotanya dan melakukan inovasi dan kreativitas dalam membangun kota dengan tidak meninggalkan budaya dan karakter lokal.

Untuk memberikan arahan dalam pencapaian visi, maka visi dijabarkan ke dalam fokus kerja yang disebut dengan Peradaban, yang merupakan akronim dari :

**Kota Serang yang Partisipatif** adalah kondisi terwujudnya kesatuan pola pikir dan pola tindak dilandasi sikap kebersamaan untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan Kota Serang secara baik, benar, dan bertanggung jawab oleh Pemerintah Kota Serang, dunia usaha, dan Warga Kota Serang sehingga terwujud pemerintahan yang baik dan Pemerintah yang Bersih (Good Governance dan Clean Government).

**Kota Serang yang Edukatif** dimaknai sebagai peningkatan kualitas kehidupan pendidikan dan kependidikan warga Kota Serang secara lebih adil dan merata sehingga memiliki kecerdasan yang memadai, mampu mengatasi masalah pribadi dan

sosial dan menggambarkan kemajuan yang tercermin dalam keseluruhan aspek kehidupan, dalam kelembagaan, pranata-pranata, dan nilai-nilai yang mendasari kehidupan politik, ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan dan keamanan.

**Kota Serang yang Religius** dimaknai sebagai kondisi warga Kota Serang yang konsisten mematuhi pesan nabi dan pemimpin yang taat pada nilai ketauhidan, yaitu mematuhi pesan agama dan berpegang teguh pada nilai-nilai moral Bangsa Indonesia sehingga dapat dicapai kemakmuran dunia dan akhirat yang hakiki.

**Kota Serang yang Akuntabel** adalah kondisi kebudayaan pemerintahan dan warga Kota Serang yang bertanggung jawab terhadap apa yang harus dan akan dilakukan sesuai peran masing-masing serta siap menerima resiko atas perbuatannya sehingga terwujud karakter setiap warga masyarakat Kota Serang, aparatur sipil negara, aparatur pemerintahan negara Republik Indonesia di Kota Serang yang lainnya bertanggung jawab terhadap diri sendiri, lingkungan alam dan sosial, serta terhadap Tuhan Yang Maha Kuasa.

**Kota Serang yang berDAYA saing** adalah suatu kondisi lingkungan institusi dan masyarakat Kota Serang yang memiliki keunggulan comparative (comparative advantage) dan keunggulan kompetitif (competitive advantage) dalam adaptasi menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang perkembangan dunia global, pemberlakuan MEA, dan Nasional.

**Kota Serang yang berBudaya** adalah kondisi lingkungan fisik kota dan lingkungan warga Kota Serang yang tertata, teratur, rapih, indah, taat azas dan tata aturan berdasarkan kesadaran akal sehat sehingga tercipta budaya dan kebudayaan yang melekat pada setiap warga negara dan tercipta hubungan harmonis dalam bermasyarakat, berbangsa, bernegara dan beragama.

**Kota Serang yang Aman** dimaknai sebagai kondisi warga Kota Serang yang tidak terganggu oleh sikap dan perbuatan yang dapat

merugikan secara fisik dan psikis sehingga bebas untuk beraktifitas memenuhi kebutuhan dalam berbagai aspek (self-help) secara bertanggung jawab, mampu mengambil keputusan dan tindakan dalam penanganan masalahnya, dan mampu merespon dan berkontribusi terhadap upaya pembangunan dan tantangan zaman secara otonom dengan mengandalkan potensi dan sumber daya yang dimiliki.

**Kota Serang yang Nyaman** adalah suatu keadaan kehidupan warga Kota Serang telah terpenuhinya kebutuhan dasar manusia meliputi ketentraman (suatu kepuasan yang meningkatkan penampilan sehari hari) dan kelegaan (karena terpenuhinya kebutuhan sehari hari) serta transcendental (keadaan yang melampaui pengalaman biasa dan penjelasan ilmiah).

Dalam melaksanakan visi tersebut didukung potensi yang ada di Kota Serang, yaitu :

**POTENSI PERDAGANGAN DAN JASA** merupakan manifestasi dari komitmen dan upaya untuk merevitalisasi sektor perdagangan dan jasa yang secara historis pernah tumbuh dan berkembang hingga pada skala mancanegara dengan Pelabuhan Karangantu sebagai Bandar utama sekaligus titik pertumbuhannya. Posisi Kota Serang yang berdekatan dengan pintu masuk dan keluar Pulau Jawa menuju Pulau Sumatera, potensi pengembangan kawasan industri padat modal dan berskala besar di wilayah Kota Cilegon, serta potensi berkembang pesatnya perdagangan skala besar di Tangerang dan sekitarnya, maka Kota Serang memiliki kesempatan untuk menjadi titik simpul pertukaran barang dan jasa bagi wilayah-wilayah titik pertumbuhan yang ada di sekitarnya tersebut. Berkembangnya permukiman di Kota Serang saat ini merupakan dampak dari perkembangan perekonomian di titik-titik pertumbuhan dimaksud, yang dapat menjadi indikasi potensial bagi tumbuhnya sektor perdagangan dan jasa di masa depan.

**POTENSI PERTANIAN** masih relevan untuk ditawarkan sebagai visi mengingat bahwa transformasi kota yang baik haruslah

berjalan secara alamiah sehingga masyarakat pun dapat ikut beradaptasi dan bertransformasi seiring dengan perkembangan kota. Dalam konteks inilah maka mendayagunakan potensi pertanian (dalam arti luas) yang secara alamiah mengkonstruksi karakteristik fisiologis Kota Serang adalah sebuah pilihan strategis yang memiliki nilai aksiologis tinggi yang dalam jangka menengah dapat menyelamatkan sebagian besar masyarakat Kota Serang yang masih sangat bergantung pada sektor agraris (pertanian, perkebunan, kehutanan) dan maritim (perikanan tangkap dan budidaya), yang pada kedua sektor ini umumnya menjadi kantong-kantong kemiskinan. Kedua, mendayagunakan potensi alamiah yang dimiliki di kedua sektor tersebut guna menyerap tenaga kerja dengan tingkat pendidikan yang relatif rendah yang masih banyak terdapat di Kota Serang saat ini. Dan Ketiga, dapat menyelamatkan ekologi Kota Serang yang lebih memiliki nilai ekonomis yang jauh lebih tinggi dalam konteks ekologis sebagai kondisi alamiahnya ketimbang didayagunakan sebagai kawasan untuk aktivitas ekonomi sektor sekunder. Dengan demikian sejumlah wilayah persawahan produktif dapat diselamatkan dari alih fungsi lahan yang cenderung tak terkendali. Dalam jangka menengah, revitalisasi pertanian ini juga dapat berkontribusi terhadap peningkatan ketahanan pangan Kota Serang sehingga dapat mengurangi dampak dari fluktuasi ekonomi makro terhadap keterpenuhan kebutuhan primer masyarakat Kota Serang. Hal ini juga sejalan dengan nawa cita yang ketujuh yaitu mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik melalui upaya memperkuat swasembada pangan untuk mewujudkan kemandirian ekonomi Kota Serang.

**POTENSI BUDAYA** merupakan manifestasi dari komitmen dan upaya untuk: (1) membina dan mengembangkan nilai-nilai kearifan lokal yang terkandung dalam kebudayaan daerah untuk direvitalisasi sebagai jatidiri kota dan masyarakat Kota



Serang sehingga dapat mewarnai segenap aktivitas dan kehidupan masyarakat sehari-hari, serta mewarnai kehidupan pemerintahan daerah; (2) merevitalisasi nilai-nilai historis Kesultanan Islam Banten yang situsya berada di wilayah Kota Serang. Upaya revitalisasi itu ditransformasikan pada aktivitas ekonomi kreatif di sektor pariwisata sehingga memiliki dampak ekonomi yang tinggi terhadap kesejahteraan masyarakat Kota Serang. Eksistensi Kota Serang saat ini sebagai destinasi wisata religi berskala nasional merupakan potensi yang dapat terus dikembangkan di masa depan; (3) melihara dan mengembangkan potensi seni dan budaya daerah untuk didayagunakan nilai ekonominya bagi kesejahteraan masyarakat, baik melalui peningkatan ekonomi kreatif maupun pengembangan potensi pariwisata sejarah, seni budaya, dan religi yang telah mulai tumbuh saat ini.

### 3.2.2 MISI

1. MENGUATKAN PERADABAN BERBASIS NILAI-NILAI KEMANUSIAAN;
2. MENINGKATKAN SARANA PRASARANA DAERAH YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN;
3. MENINGKATKAN PEREKONOMIAN DAERAH DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT YANG BERDAYA SAING;
4. MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK;

Oleh karenanya Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga Kota Serang berkewajiban untuk menjalankan komitmen Walikota terpilih yang mengacu pada Visi Kota Serang **"TERWUJUDNYA KOTA PERADABAN YANG BERDAYA DAN BERBUDAYA"** :

Serta pada MISI KESATU (1) yaitu MENGUATKAN PERADABAN BERBASIS NILAI-NILAI KEMANUSIAAN;

Dan MISI KETIGA (3) yaitu MENINGKATKAN PEREKONOMIAN DAERAH DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT YANG BERDAYA SAING;

Selanjutnya Disparpora Kota Serang dalam operasionalnya akan selalu mengacu kepada rencana strategis dengan mengarahkan segenap potensi dan sumberdaya yang ada, baik sumber daya manusia maupun pendukung lainnya yang tentunya memperhatikan akan kekuatan dan kelemahan yang akan dimuat dalam RENSTRA Disparpora Kota Serang Tahun berjalan.

Sebagai pelaksana Pemerintah Daerah Kota Serang di bidang Pengembangan Pariwisata, Pembinaan Kepemudaan dan Olah raga, Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga dalam menjalankan kegiatan dan programnya akan selalu berlandaskan kepada Misi Kota Serang sebagai arah dan tuntunan untuk mencapai tujuan Kota Serang sebagai penjabaran Visi Kepala Daerah yang terpilih.

**TABEL 3.2**

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan BPBD Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2018-2023

VISI : <b>TERWUJUDNYA KOTA PERADABAN YANG BERDAYA DAN BERBUDAYA</b>				
NO	Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2019-2023	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor (X) Realisasi Program	
			Penghambat	Pendorong
<b>1</b>	<b>MENGUATKAN PERADABAN BERBASIS NILAI-NILAI KEMANUSIAAN</b>			
	Program Kepemudaan	<i>KURANGNYA KEMANDIRIAN PEMUDA</i>	Rendahnya minat generasi muda menjadi pemuda pelopor	Dukungan dalam tercapainya jumlah pemuda pelopor
			Rendahnya kemampuan generasi muda menjadi pemuda mandiri	Dukungan dalam tercapainya jumlah pemuda mandiri
			Rendahnya keinginan pemuda ikut serta dalam pembangunan	Adanya Fasilitas peran serta pemuda dalam pembangunan
			Kurangnya Kewaspadaan pemuda terhadap bahaya narkoba	Adanya upaya pemahaman Bahaya narkoba pada pemuda
	Program Keolahragaan	<i>BELUM OPTIMALNYA PEMBINAAN CABOR BERPRESTASI</i>	Tidak efektifnya pemenuhan sarana dan prasarana Olah raga	Dukungan dalam pemenuhan sarana dan prasarana Olah raga

			Rendahnya kesadaran dalam Pembinaan dan pengembangan olah raga di masyarakat	Kuatnya dukungan berbagai pihak dalam pemasyarakatan berolah raga
			Rendahnya kepedulian dalam Pembinaan dan pengembangan cabang olah raga	Kuatnya dukungan peningkatan prestasi cabang olah raga daerah
3	<b>MENINGKATKAN PEREKONOMIAN DAERAH DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT YANG BERDAYA SAING</b>			
	Program Pengembangan Kemitraan		Rendahnya kualitas Sumber daya Pariwisata	Tuntutan terhadap kualitas Sumber daya Pariwisata
	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	<i>BELUM OPTIMALNYA PEMBENTUKAN DAN PENGEMBANGAN DESTINASI</i>	Tidak efektifnya Pemenuhan sarana dan prasarana pariwisata	Kuatnya dukungan peningkatan sarana dan prasarana pariwisata
			Rendahnya inovasi dalam Pengembangan Objek Pariwisata	Tuntutan dalam Pengembangan Objek Pariwisata yang berkualitas
	Program Promosi Pariwisata	<i>KURANG OPTIMALNYA PROMOSI PARIWISATA</i>	Kurangnya minat Kerjasama Pariwisata daerah	Banyaknya usulan investasi Pariwisata daerah
			Rendahnya kreatifitas dalam Pengembangan Atraksi Pariwisata	Tuntutan kreatifitas dalam Pengembangan Atraksi Pariwisata
			Kurangnya kesadaran dalam pengembangan ekonomi kreatif pariwisata	Dukungan dalam Pengembangan ekonomi kreatif pariwisata

### 3.3 TELAHAH RENSTRA KEMENTRIAN DAN RENSTRA DINAS PROPINSI BANTEN

#### 3.3.1 TELAHAH RENSTRA KEMENTRIAN PARIWISATA DAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROPINSI BANTEN

Dalam penyusunan suatu rencana pembangunan tentu dibutuhkan sinkronisasi di berbagai aspek, misalnya aspek waktu, aspek kesesuaian dengan Program Vertikal maupun Horizontal serta kesesuaian dengan kaidah lainnya. Rencana Strategis Dinas Pemuda, Olah raga dan Pariwisata Kota Serang mengacu kepada Visi dan Misi Kementerian Pariwisata, yaitu :

Visi Pembangunan Kementerian Pariwisata, menggunakan pijakan Visi Presiden Republik Indonesia periode 2014-2019, yaitu:

**VISI** "TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG"

Berdasarkan visi tersebut, Presiden Republik Indonesia periode 2014-2019 merumuskan misi yang dikerucutkan ke dalam 9 agenda prioritas Pemerintah yang disebut NAWACITA. Di dalamnya, terkandung agenda prioritas pemerintah Republik Indonesia 2015-2019 yang terkait pada pariwisata, adalah agenda prioritas butir keenam yakni :

"MENINGKATKAN PRODUKTIFITAS RAKYAT DAN DAYA SAING DI PASAR INTERNASIONAL SEHINGGA BANGSA INDONESIA DAPAT MAJU DAN BANGKIT BERSAMA BANGSA-BANGSA ASIA LAINNYA"

Adapun Misi Kementrian Pariwisata adalah :

1. Mengembangkan destinasi pariwisata yang berdaya saing, berwawasan lingkungan dan budaya dalam meningkatkan pendapatan nasional, daerah dan mewujudkan masyarakat yang mandiri;
2. Mengembangkan produk dan layanan industri pariwisata yang berdaya saing internasional, meningkatkan kemitraan usaha, dan bertanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya;
3. Mengembangkan pemasaran pariwisata secara sinergis, unggul, dan bertanggung jawab untuk meningkatkan perjalanan wisatawan nusantara dan kunjungan wisatawan mancanegara sehingga berdaya saing di pasar Internasional; dan
4. Mengembangkan organisasi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi, dan mekanisme operasional yang efektif dan efisien serta peningkatan kerjasama internasional dalam rangka meningkatkan produktifitas pengembangan kepariwisataan dan mendorong terwujudnya pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan

Visi ini mencerminkan kebulatan tekad dalam melaksanakan fungsi dan tanggung jawab dalam peningkatan pariwisata melalui promosi dan pengembangan

destinasi serta objek unggulan. Hal tersebut searah dengan Kebijakan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Pemerintah Provinsi Banten melalui perumusan Visi dan Misi yang sejalan dengan Kementerian Pariwisata dan rumusan visi mengacu pada visi misi gubernur terpilih, yaitu :

**VISI " MEWUJUDKAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA BANTEN YANG BERDAYA SAING DAN BERKELANJUTAN "**

Dengan demikian Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga Kota Serang dalam menyusun Rencana Strategis tahun 2019-2023 secara substansi menselaraskan/ mensinkronkan dengan Visi dan Misi serta arah kebijakan dan strategis renstra Kementerian Pariwisata dan Dinas Kebudayaan dan pariwisata Provinsi Banten.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Banten, Berpijak pada kedudukan, tugas dan fungsi serta dengan memperhatikan visi dan misi nasional, visi dan misi Provinsi Banten, visi dan misi pengembangan kepariwisataan nasional, visi dan misi ekonomi kreatif serta memperhatikan isu strategis yang dihadapi. Seiring dengan upaya mendukung pencapaian misi daerah serta dalam rangka mewujudkan Visi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten Tahun 2018-2022, maka selanjutnya ditetapkan Misi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten sebagai berikut:

Misi ke-1 :

**Melestarikan nilai, keragaman dan kekayaan Budaya**

Ditujukan untuk : (1) Meningkatkan kualitas perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan bidang kesenian; (2) Meningkatkan pelestarian nilai-nilai tradisi; dan (3) Meningkatkan kualitas pelestarian warisan budaya

Misi ke-2 :

**Mengembangkan destinasi pariwisata yang berdaya saing**

Ditujukan untuk : (1) Mengembangkan destinasi pariwisata yang berdaya saing; dan (2) Meningkatkan kualitas usaha pariwisata berbasis ekonomi kreatif

Misi ke-3 :

**Meningkatkan sumberdaya manusia dan kelembagaan kebudayaan & pariwisata yang profesional**

Ditujukan untuk : (1) Meningkatkan kerjasama dan kemitraan; (2) Meningkatkan penguatan kelembagaan; dan (3) Meningkatkan daya saing sumber daya manusia

Misi ke-4 :

**Mengembangkan pemasaran kebudayaan dan pariwisata**

Ditujukan untuk : Memperluas jejaring pemasaran kebudayaan dan pariwisata

Misi ke-5 :

**Meningkatkan kapasitas kelembagaan dinas kebudayaan dan pariwisata**

Ditujukan untuk : (1) Meningkatkan kualitas SDM Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten yang profesional dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; (2) Terwujudnya rencana program dan penganggaran serta evaluasi dan pelaporan yang berkualitas; (3) Terwujudnya organisasi dan tatalaksana yang sesuai dengan kebutuhan tugas pokok dan fungsi; dan (4) Meningkatkan ketersediaan data dan informasi pembangunan yang akurat. Sedangkan Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah pada Urusan Pilihan Pariwisata dapat dirumuskan sebagai berikut :

Faktor Penghambat Pelayanan Pariwisata :

1. Kurangnya Kapasitas dan Kapabilitas kelembagaan Disparpora dalam melihat tuntutan terhadap kebutuhan pengembangan pariwisata
2. Masih kurangnya pengembangan destinasi pariwisata yang berdaya saing
3. Masih rendahnya kualitas sumberdaya manusia dan kelembagaan pariwisata

Faktor Pendorong Pelayanan Pariwisata :

1. Dukungan regulasi dalam pengembangan Pariwisata Daerah
2. Dukungan masyarakat pariwisata dalam pengembangan destinasi dan promosi pariwisata
3. Dukungan struktural terhadap peningkatan jumlah wisatawan

### 3.3.2 TELAAH RENSTRA KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA DAN DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA PROPINSI BANTEN

Dalam penyusunan suatu rencana pembangunan tentu dibutuhkan sinkronisasi di berbagai aspek, misalnya aspek waktu, aspek kesesuaian dengan Program Vertikal maupun Horizontal serta kesesuaian dengan kaidah lainnya. Rencana Strategis Dinas Pemuda, Olah raga dan Pariwisata Kota Serang mengacu kepada Visi dan Misi Kementerian Pemuda dan Olah Raga, yaitu :

**VISI : "MEWUJUDKAN KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN YANG BERDAYA SAING"**

Adapun Misi Kementerian pemuda dan Olah raga adalah :

**"MENINGKATKAN DAYA SAING KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN"**

Visi ini mencerminkan kebulatan tekad dalam melaksanakan fungsi dan tanggung jawab dalam penanganan masalah pemuda dan pengembangan olah raga.

Hal tersebut searah dengan Kebijakan Dinas Pemuda dan Olah raga Pemerintah Provinsi Banten melalui perumusan Visi dan Misi yang sejalan dengan Kementerian pemuda dan Olah raga dan rumusan visi mengacu pada visi misi gubernur terpilih, yaitu :

**VISI "PEMUDA MAJU MANDIRI DAN MEMBUDAYAKAN OLAHRAGA YANG BERPRESTASI"**

Adapun Misi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten sebagai berikut :

1. TERWUJUDNYA KAPASITAS DAN KAPABILITAS KELEMBAGAAN DISPORA PROVINSI BANTEN;
2. MEWUJUDKAN PEMUDA YANG BERKARAKTER PRODUKTIF, BERORIENTASI MAJU MANDIRI DAN BERDAYA SAING;
3. TERCAPAINYA PEMBINAAN OLAHRAGA BERPRESTASI SERTA MEMBUDAYAKAN DAN MEMASYARAKATKAN OLAHRAGA;

Dengan demikian Kepemudaan dan Olahraga Kota Serang dalam menyusun Rencana Strategis tahun 2019-2023 secara substansi menselaraskan/ mensinkronkan dengan Visi dan Misi serta arah kebijakan dan strategis renstra Kementerian Pemuda dan Olah raga dan Dinas Pemuda dan Olah raga Provinsi

Banten. Sedangkan Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah pada Urusan Pemuda dan Olah raga dapat dirumuskan sebagai berikut :

Faktor faktor Penghambat Pelayanan Pemuda dan Olah raga :

1. Kurangnya Kapasitas dan Kapabilitas kelembagaan Disparpora dalam melihat tuntutan terhadap kebutuhan kepemudaan dan Olah raga
2. Belum efektifnya Pembinaan Olah raga Berprestasi serta membudayakan dan memasyarakatkan Olah raga
3. Masih kurangnya kesadaran pemuda terhadap perannya dalam pembangunan sebagai Pemuda mandiri ataupun Pemuda pelopor dalam meningkatkan daya saing pemuda

Faktor faktor Pendorong Pelayanan Pemuda dan Olah raga :

1. Dukungan regulasi dalam Pembinaan Kepemudaan
2. Dukungan Fasilitasi kepemudaan dan Sarana prasarana pelatihan pada cabang olah raga
3. Dukungan struktural terhadap capaian Prestasi Nasional pada Pemuda dan Cabang Olah raga

#### **3.4 TELAHAH RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS**

Pelayanan Kepemudaan, Olah raga dan Pariwisata telah diatur terinci dalam program dan kegiatan pada Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah raga yang disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Serang.

Sedangkan dalam Permendagri nomor 86 tahun 2017 disebutkan bahwa KLHS merupakan rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.



### Isu Strategis pada Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah raga

Tujuan TPB	Isu Strategis	Jumlah Indikator Sudah Terlaksana
8. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua.	8.1. Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7% pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang.	8.1.1.1
	8.2. Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya.	8.2.2.1
	8.3. Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.	8.3.3.1 8.3.3.2

Nama OPD	Persentase Anggaran untuk TPB	Isu Strategis
Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	5,91%	1. Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal

### 3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Dalam penentuan isu strategis ini DISPARPORA Kota Serang melihat dari berbagai sisi baik di internal ataupun eksternal dimana isu-isu ini digolongkan berdasarkan kebutuhan organisasi untuk menjadikan DISPARPORA Kota Serang lebih baik. Sisi eksternal yang perlu dipertimbangkan dalam penentuan isu strategis adalah :

1. Isu Strategis RPJPD 2008-2025, pada isu strategis ke-dua tentang Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Dan Kesejahteraan Masyarakat dengan Permasalahan pokok : Kualitas dan peran pemuda dalam pembangunan dan olah raga. Dan pada isu strategis ke-tiga tentang Pengembangan Dan Peningkatan Daya Saing Ekonomi Daerah.
2. Isu Strategis RPJMD Propinsi Banten, pada Isu strategis daya saing daerah (Sumber daya alam dan sumber daya manusia)

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat diidentifikasi isu strategis urusan Pemuda, Olah raga dan Pariwisata, yaitu; isu strategis berdasarkan beberapa aspek seperti;

1. **Aspek kajian tugas pokok, fungsi, dan kewenangan Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah raga Kota serang**, dimana isu strategis yang paling mendasar, yaitu rincian tugas dan fungsi Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah raga yang belum tersedia dan belum didukung oleh indikator kinerja utama, indikator kinerja mandiri, indikator kinerja kunci, SPM, maupun lampiran Permendagri 86 tahun 2017. Sehingga berpotensi menghambat pada pencapaian misi-1 yaitu : "MENGUATKAN PERADABAN BERBASIS NILAI-NILAI KEMANUSIAAN" dan misi-3 yaitu : "MENINGKATKAN PEREKONOMIAN DAERAH DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT YANG BERDAYA SAING" serta berpotensi terjadinya tumpang tindih antar urusan.
2. **Aspek kajian renstra kementerian dan Propinsi Banten**, dimana isu strategis yang paling mendasar, yaitu perbedaan tugas, pokok, fungsi, dan kewenangan antara Kementerian, Provinsi, dan Kota, menyebabkan adanya perbedaan isu strategis, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Namun substansi keterpaduan akan tercapai jika Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah raga menerapkan indikator kinerja yang regulatif.

3. **Aspek Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)**, dimana isu strategis yang paling mendasar, yaitu belum adanya keterpaduan antara perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pengawasan, dan penertiban ruang, khususnya terkait dengan pola ruang pemanfaatan dan budidaya, hal ini antara lain disebabkan mekanisme pasar yang dinamis dan lemahnya pengendalian dan penertiban perda RTRW.
4. **Aspek Kebijakan Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)**, dimana isu strategis yang paling mendasar, yaitu mitigasi KRP sulit dilakukan, sebab Kebijakan, Rencana dan Program tidak merepresentasikan indikator kinerja dan sasaran yang jelas, hal ini disebabkan nama program, kegiatan terbatas hanya yang tertera dalam permendagri No.13 tahun 2006, sehingga tidak merepresentasikan indikator kinerja (daya dukung dan daya tampung).

Isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah raga dimasa datang. Identifikasi isu strategis pada pelayanan Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah raga dilakukan dengan menggunakan metode diskusi dan FGD. Adapun daftar isu strategis yang dihasilkan dari diskusi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Penataan Manajemen Keolahragaan
2. Pembinaan dan Pengembangan Pemuda
3. Pemasarakatan dan Pemberdayaan Olah Raga
4. Pengembangan Olah raga Berprestasi
5. Peningkatan Promosi Pariwisata
6. Pengembangan Destinasi dan Objek Wisata
7. Peningkatan Layanan Kepemudaan
8. Peningkatan Ketersediaan Sarana Prasarana Olah Raga
9. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Pariwisata
10. Penanganan dan Pengendalian Bahaya Narkotika

Penentuan isu strategis merupakan hasil identifikasi masalah yang dihadapi dalam pelayanan Kepemudaan, Olah raga dan Pariwisata. Dengan menganalisa Daftar Permasalahan, Isu Strategis RPJPD 2008-2025 dan Isu Strategis RPJMD Propinsi Banten serta faktor Penghambat dan Pendorong Urusan pemuda, Olah

raga dan Pariwisata maka dapat dirumuskan isu strategis Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah raga. Sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut ini :

TABEL 3.3

**Isu Strategis DISPARPORA**

NO	ISU STRATEGIS
1	Pembinaan dan Pengembangan Pemuda
2	Pemasyarakatan dan Pemberdayaan Olah Raga
3	Pembinaan Olah raga Berprestasi
4	Promosi Pariwisata
5	Pengembangan Destinasi dan Objek Wisata

TABEL 3.4

**Aspek Isu Strategis**

NO	ISU STRATEGIS	ASPEK TERKAIT
1	Pembinaan dan Pengembangan Pemuda	Pendayagunaan Pemuda mandiri dan Pemuda pelopor
		Pembinaan organisasi dan komunitas Kepemudaan
		Kemitraan dan Kewirausahaan Pemuda
2	Pemasyarakatan dan Pemberdayaan Olah Raga	Olah raga rekreasi dan massal
		Pemberdayaan Komunitas olah raga dengan kegiatan yang berkelanjutan
		Sarana Prasarana Olah raga yang dibutuhkan masyarakat
3	Pembinaan Olah raga Berprestasi	Prestasi Olah raga dengan Pembinaan cabang olah raga
		Penerapan teknologi olahraga
		Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar (PPLP)
4	Promosi Pariwisata	Pemanfaatan teknologi informasi
		Kerjasama pariwisata
		Penataan dan Pengembangan atraksi Pariwisata
5	Pengembangan Destinasi dan Objek Wisata	Penataan kawasan wisata
		Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM Pariwisata
		Dukungan sarana dan prasarana penunjang Destinasi

Adapun penjelasan isu strategis adalah :

- a. Membina dan mengembangkan kepemudaan melalui pemahaman terhadap problematika Pemuda, menggali dan inventarisasi potensi pemuda, Internalisasi Belajar dan Spesialisasi pemuda, proses sosialisasi

pemuda dan peranan mahasiswa dalam masyarakat untuk membentuk tata nilai pemuda yang sesuai nilai-nilai kebangsaan dan dapat berkontribusi dalam prestasi di kota serang.

- b. Pemasyarakatan dan Pemberdayaan Olah Raga untuk meningkatkan ketahanan fisik masyarakat melalui olah raga rekreasi dan event olah raga massal serta meningkatkan prestasi komunitas olah raga di kota serang, termasuk peningkatan ekonomi melalui industri olah raga, di antaranya peralatan dan perlengkapan serta konstruksi fasilitas olahraga. Untuk meningkatkan prestasi olah raga di kota serang perlu ada kegiatan yang berkelanjutan dalam pemasyarakatan olah raga dan pemberdayaan komunitas olah raga.
- c. Pembinaan olahraga prestasi perlu didukung peningkatan sarana prasarana olahraga dan sumberdaya manusia yang kompeten. Pembinaan olahraga prestasi diletakkan di atas landasan pendidikan jasmani dalam berbagai jenis dan jenjang pendidikan. Pembinaan dilakukan dengan memperhatikan beberapa kecenderungan berikut ; **Pertama**, introduksi dan penerapan teknologi olahraga untuk mendorong efisiensi pembinaan olahraga prestasi dengan riset dan pengembangan dalam bidang keolahragaan, baik di perguruan tinggi maupun di lembaga riset swasta dan milik pemerintah. **Kedua**, pendirian Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar (PPLP) Konsep dasarnya ialah bagaimana mengintegrasikan kegiatan pelatihan dan pendidikan secara serasi yang didukung oleh logistik.
- d. Promosi Pariwisata di kota serang hingga kini belum efektif karena sejumlah masalah krusial masih dihadapi dalam pengembangan pariwisata. Hal penting yang perlu dikembangkan dalam promosi pariwisata di kota Serang; **Pertama** adalah konektivitas dan koordinasi lintas sektor. **Kedua** dana promosi dan SDM dari manajemen pengelola pariwisata. **Ketiga** adalah Sinkronisasi kebijakan di pusat dan daerah. Termasuk didalamnya peningkatan anggaran pariwisata perlu didukung sinkronisasi kebijakan di pusat dan daerah. **Keempat**, masalah komunikasi dan publisitas dapat ditingkatkan dengan pemanfaatan teknologi informasi. Melalui pemanfaatan teknologi informasi yang massif akan sangat membantu promosi wisata saat ini.

- e. Pengembangan Destinasi dan Objek Wisata merupakan pengaturan alokasi ruang agar dapat menjamin sustainable development untuk meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya buatan secara berdaya guna, berhasil guna, dan tepat guna. Pengembangan pariwisata berkait erat dengan pengembangan destinasi dan objek wisata dimana diperlukan strategi dengan langkah berikut; **Pertama** adalah Penataan kawasan wisata perlu mengikuti kaedah teknis penataan ruang dan terpadu. **Kedua** adalah pengembangan kegiatan pariwisata perlu difokuskan tidak hanya pada aspek fisik tapi juga pengembangan aspek non-fisik, seperti potensi kebudayaan yang dimiliki oleh daerah tersebut. **Ketiga** adalah pengelolaan konflik antar sektor yang masih terjadi dalam mengembangkan kegiatan pariwisata, seperti misalnya konflik antar sektor pertanian dengan sektor pariwisata, dimana pengembangan kawasan wisata mempengaruhi penyediaan air baku untuk kawasan pertanian. **Keempat**, perlu adanya pembagian manfaat antara investor dan masyarakat sekitar, agar ada rasa ikut memiliki, seperti pokdarwis. **Kelima** adanya dukungan sarana dan prasarana penunjang. Dimana dukungan sarana dan prasarana merupakan faktor penting untuk keberlanjutan penyelenggaraan kegiatan pariwisata, seperti penyediaan akses, akomodasi, angkutan wisata, dan sarana prasarana pendukung lainnya. Masih banyak kawasan wisata yang sangat berpotensi tetapi masih belum didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai. Selain itu sarana dan prasarana yang dibangun hanya untuk kepentingan lokal saja, belum dapat melayani kebutuhan penyelenggaraan pariwisata di luar lokasi. Seperti misalnya penyediaan angkutan wisata hanya tersedia di area kawasan wisata saja, tetapi sarana angkutan untuk mencapai kawasan tersebut dari akses luar belum tersedia. **Keenam**, Kebijakan & peraturan yang berlaku dalam lingkup negara dan daerah yang mendukung pengembangan destinasi dan objek wisata. **Ketujuh** adalah peningkatan kuantitas dan kualitas SDM Pariwisata untuk menunjang kegiatan pariwisata daerah. **Kedelapan**, perlunya kesiapan masyarakat dengan mendukung terciptanya sapta pesona. **Kesembilan**, meningkatkan investasi pariwisata.